

BAB V

KESIMPULAN

Indonesia masih perlu untuk meningkatkan kapabilitas serta alutsista untuk menunjang penjagaan kedaulatan yang dilaksanakan oleh personel TNI. Maka tidak mengherankan apabila belakangan ini banyak pelanggaran area ZEE yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Hal ini dapat terjadi karena pengawasan maritim kita yang belum optimal. Idealnya sebagai negara maritim Indonesia diperkuat dengan gugus tempur yang terdiri dari *korvet Anti Submarine Warfare (ASW)*, *Anti Air Warfare (AAW)*, *frigate multirole*, belasan kapal selam, serta *Offshore Patrol Vessel (OPV)* sebagai armada patroli yang mampu mengarungi batas-batas terluar laut Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa salah satu faktor krusial dalam memenangkan pertempuran selain dengan strategi dan logistik, penguasaan serta pembaruan pada teknologi juga memainkan peran yang sangat vital.

Dengan berkembangnya RMA, memaksa TNI untuk mulai memperbaiki doktrin tempur mereka. Doktrin tempur yang baru ini juga harus senantiasa didukung oleh alutsista yang tepat. Sementara itu, pemerintah menyadari bahwa pengadaan alutsista secara drastis, akan membebani keuangan negara. Dengan memperhatikan kondisi ekonomi serta perkembangan lebih lanjut mengenai doktrin perang modern, pemerintah mencetuskan pemenuhan skala minimum pertahanan Indonesia dalam kebijakan MEF. Kebijakan *Minimum Essential Force (MEF)* ini diharapkan akan memiliki output berupa pembaruan alutsista TNI serta doktrin tempur baru secara bertahap hingga tahun 2024.

Diplomasi pertahanan dilakukan untuk memenuhi target setiap tahunnya. Setelah penundaan lama pengadaan SU-35, Menteri Pertahanan Prabowo kembali mengupayakan keberlangsungan kontrak tersebut, namun sanksi CAATSA selalu membayangi dalam setiap pengadaan kontrak peralatan militer yang berasal dari Rusia. Menghadapi dilema yang selalu berulang, maka Menteri Pertahanan Prabowo mencoba opsi lain dengan melakukan peninjauan pengadaan dari negara lain di Eropa. Setelah usulannya membeli *Eurofighter* bekas Austria mendapat kritik dari berbagai kalangan, Prabowo mulai mencoba untuk menjajaki pengadaan *Rafale* baru dari Prancis. Jika dilihat, beberapa alutsista yang dimiliki

Indonesia ada juga yang buatan Prancis seperti tank ringan dan artileri medan, yang menjadikan Prancis dipandang dapat menjadi mitra strategis Indonesia di masa depan. Penjualan berlanjut hingga penandatanganan kontrak pengadaan 6 unit awal *Rafale* untuk selanjutnya menyusul 42 unit. Kebutuhan akan pesawat tempur supremasi udara sudahlah sangat mendesak bagi Indonesia.

Di mata lain Indonesia di bawah Menteri Pertahanan Prabowo juga menjajaki peremajaan alutsista fregat berat dari Denmark. Kelas *Iver Huitfeldt* menjadi incaran untuk menggantikan fregat kelas Ahmad Yani yang akan segera dipensiunkan. Selain fregat berat *Iver Huitfeldt* yang kemudian diakuisisi oleh perusahaan Inggris Babcock dan berganti nama menjadi *Arrowhead 104*. Indonesia juga menandatangani kontrak pembelian fregat FREEM dari Italia.

Dengan datangnya *Rafale* dan FREEM, selain akan menambah alutsista TNI juga berpotensi untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri melalui *Transfer of Technology*. Diharapkan Indonesia akan dapat melakukan perawatan pesawat dan kapal secara mandiri serta membuat suku cadangnya di dalam negeri. Kemampuan ini akan meningkatkan kapabilitas negara dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Indonesia yang memiliki banyak pengalaman tempur insurgensi pada akhirnya harus menerima bahwa adaptasi teknologi perang modern adalah mutlak adanya. Sehingga perdebatan tentang mana yang lebih baik antara pembangunan puskesmas dengan pembelian kapal selam tidaklah lagi relevan. Mengutip ucapan Prabowo saat wawancara dengan I News, bahwa tidak akan ada kemakmuran tanpa adanya jaminan keamanan. Sangat jelas bahwa ketidakmakmuran nelayan di Natuna salah satunya adalah karena lemahnya pengawasan di area tersebut. *Si Vis Pacem Para Bellum*. Jika kita ingin damai maka kita harus bersiap untuk berperang.